Bentuk Pansus

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang didapat Pemerintah Provinsi Kalbar untuk APBD 2018 berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar. Sebagaimana diketahui, sebelum APBD 2018, Pemprov meraih enam kali berturut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

• Baca Halaman 7

bentuk pansus

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria. Yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Anggota DPRD Kalbar dari Fraksi PDIP, Martinus Sudarno prihatin dengan penurunan tersebut. Kalbar sudah enam kali berturut-turut mendapatkan opini WTP, tapi tahun 2018 ternyata menurun jadi WDP.

"Tentu kami sangat kecewa terhadap prestasi pemerintah Kalbar. Kita sudah enam kali berturut-turut mendapatkan WTP, tetapi begitu pergantian pemerintahan, justru di awali dengan hal sangat mengecewakan," katanya, Selasa (28/5).

Ada beberapa faktor menyebabkan penurunan opini ini. Misalnya, ketidakpatuhan Pemprov Kalbar terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan APBD. Pemerintah memindahkan anggaran dari satu pos ke pos lain, tanpa persetujuan DPRD.

Kemudian tahun 2018, Kalbar tidak mempunyai perubahan APBD. Tapi Pemprov Kalbar melakukan perubahan sendiri, tanpa persetujuan DPRD Kalbar.

"Oleh karena itu kami meminta saudara Gubernur untuk bertanggungjawab atas opini ini. Atas temuan-temuan BPK RI harus ditindaklanjuti sampai tuntas," jelasnya.

Sebagaimana mekanisme, DPRD Kalbar akan membentuk pansus untuk menyelidiki hal-hal apa yang membuat opini ini menurun, atau menindaklanjuti temuan-temuan BPK.

Dia meminta Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengevaluasi menyeluruh pelaksanaan APBD. Supaya di tahun-tahun mendatang, pelaksanaan APBD lebih baik sesuai aturan.

"Jangan Gubernur pandai-pandai sendiri dan menganggap pintar sendiri. Selama inikan kita melihat komentar-komentar beliau di koran dan di mana-mana itu, seakan-akan yang dilakukan Pemerintah sebelumnya salah semua. Tapi justru yang terjadi di pemerintah sebelumnya lebih baik dari sekarang," ujarnya.

Terpenting, taat asas. Tidak mengubah APBD tanpa persetujuan DPRD.

"Gubernur wajib melaksanakan perda. Jadi tidak boleh Gubernur mengubah sendiri, harus sesuai dengan aturan dan APBD adalah kesepakatan antara Pemprov dan DPRD," tegasnya.

Apa yang tercantum dalam APBD, wajib dilaksanakan oleh Gubernur. Di luar itu, berarti terjadi penyimpangan atau tidak kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Demi Kalbar, kita siap bekerja sama dengan siapa saja. Tapi pihak Gubernur bagaimana, sebab banyak masukan dari DPRD tidak dianggap oleh Gubernur," katanya.

Dia mencontohkan, pelaksanaan APBD 2019 lalu. Fraksi PDI-Perjuangan ingin pembahasan APBD dilakukan secara tuntas. Tetapi Gubernur ingin cepat-cepat mengesahkan APBD.

"Padahal banyak hal yang belum tuntas dibicarakan," jelasnya.

Wakil DPRD Kalbar, Suriansyah mengatakan opini WDP diraih lantaran tidak ada kesepakatan antara Pemprov dan DPRD Kalbar tentang APBD Perubahan 2018. Akibatnya, beberapa pengeluaran yang telanjur dikeluarkan Pemprov, belum diakomodir dalam APBD Perubahan.

"Itulah yang membuat terjadi, pergeseran anggaran yang tidak sepertujuan DPRD. Itu yang berakibat pada menurunnya WTP ini," jelasnya.

Rabu (29/5) hari ini, akan ada paripurna pertanggungjawaban APBD. Mulai dasar itu, pihaknya akan membentuk pansus untuk membahas dan melihat apa saja pengeluaran yang tidak terakomodir di dalam APBD Perubahan tersebut.

"Untuk kita koreksi, jadi di dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) itu ada temuan. Temuan itu harus ditindaklanjuti 60 hari setelah penyampaian LHP ini," jelasnya.

DPRD bertugas mengawasi apa yang harus dilakukan Pemprov. Selama ini, kedua pihak kurang bersinergi lantaran tidak tercapai kesepakatan tentang perubahan APBD tepat pada waktunya.

"Karena dibatasi waktu, pada sampai batas waktunya belum tercapai kesepakatan. Sehingga tidak ditandatangani APBD Perubahan 2018," jelasnya. **(iat/bls)**